STUDI KASUS HUKUM

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI TOL PADANG SICINCIN : Studi Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg dan Putusan No. 2229 K/Pid.Sus/2023

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Andalas

OLEH :

ZILLAN ZOLILAH SANTAYANA

2210112016

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)

Pembimbing :

Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum

Dr. Edita Elda, S.H., M.H

PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

No. Reg: 52/PK-IV/IV/2026



No. Alumni Universitas	Zillan Zolilah Santayana	No. Alumni Fakultas

a. Tempat/Tgl Lahir : Solok / 12 Agustus 2004
b. Nama Orangtua : Astra Santayana, Mike Yendrita, A.Md. Kep
c. Fakultas : Hukum
d. PK : Hukum Pidana
e. No. BP : 2210112016
f. Tanggal Lulus : 24 Agustus 2026
g. Predikat Lulus : Dengan Pujian
h. Lama Studi : 4 Tahun
i. IPK : 3,84
j. Alamat : Jln. Makmur Berok, Kota Solok

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI TOL PADANG SICINCIN : Studi Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg dan Putusan No. 2229 K/Pid.Sus/2023

(Zillan Zolilah Santayana, 2210112016, Fak. Hukum Universitas Andalas, 113 Hlm, 2026)

ABSTRAK

Korupsi merupakan *extraordinary crimes* yang tiada habisnya di Indonesia, salah satunya kasus korupsi di Sumatera Barat perihal proyek Jalan Tol Trans Sumatera yang terletak di Tol Padang-Sicincin. Dari 13 (ketigabelas) orang terdakwa, 3 (tiga) diantaranya adalah PNS BPN yang berperan dalam penerbitan dan mengumumkan daftar nominatif yang menjadi pintu masuk untuk proses pencairan ganti kerugian kepada masyarakat hingga menimbulkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp 27 Miliar. Pada tingkat pertama dijatuhkan putusan bebas namun berganti menjadi putusan pemidanaan setelah permohonan kasasi penuntut umum dikabulkan. Berdasarkan hal tersebut penulis hendak mengangkat dua permasalahan, yakni: 1) Bagaimanakah pembuktian pada tindak pidana korupsi Tol Padang Sicincin dalam putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg dan putusan No. 2229 K/Pid.Sus/2023; 2) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi Tol Padang Sicincin pada putusan No. 9/Pid.SusTPK/2022/PN Pdg dan putusan No. 2229 K/Pid.Sus/2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang memuat bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan dan studi dokumen serta wawancara. Adapun wawancara dilakukan dengan Aparat Penegak Hukum yakni Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Padang, Jaksa di Kejaksaan Negeri Pariaman, Kejaksaan Negeri Padang dan Kejaksaan Tinggi Sumbar; Advokat di Kantor Hukum Legality; Akademisi dalam kepakaran hukum pidana dan hukum agraria di Universitas Andalas; Pejabat teknis yakni Pegawai Badan Pertanahan Nasional di Kanwil BPN Sumbar. Hasil penelitian yang diperoleh yakni: 1) Pembuktian dilakukan dalam dua putusan yakni putusan bebas pada tingkat pertama yang dilakukan berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP mengenai pembuktian dari alat bukti serta putusan pemidanaan pada tingkat kasasi yang dilakukan berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP mengenai Mahkamah Agung dapat memeriksa di tingkat kasasi atas tiga alasan pemeriksaan; 2) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dan putusan pemidanaan disebabkan oleh pertimbangan yuridis maupun *non*-yuridis. Pertimbangan yuridis berupa pertimbangan atas fakta yang didapatkan pada persidangan dan penilaian atas unsur dalam dakwaan sedangkan pertimbangan *non*-yuridis tentang alasan memberatkan dan meringankan para terdakwa. Berdasarkan penelitian ini diberikan saran kepada aparat penegak hukum, pemerintah, pegawai Badan Pertanahan Negara serta masyarakat baik dalam hal pembuktian di persidangan serta pertimbangan dari adanya putusan yang mampu menjadi upaya preventif dari tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas, Tindak Pidana Korupsi, Tol Padang Sicincin.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus 24 Agustus 2026.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
Nama Terang	**Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL**	**Riki Afrizal, S.H., M.H.**

Mengetahui,
Ketua Departemen Hukum Pidana: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:



Alumni University Number	Zillan Zolilah Santayana	Alumni University Number

a. Place/Date of Birth : Solok/ 12th August 2004
b. Parents' Name : Astra Santayana, Mike Yendrita, A.Md. Kep
c. Faculty : Law
d. Concentration : Criminal Law
e. Student ID : 2210112016

f. Graduation Date : 24th August 2026
g. Pass Predicate : Cumlaude
h. Length of Study : 4 Years
i. GPA : 3,84
j. Address : Jln. Makmur Berok, Kota Solok

JUDGE'S CONSIDERATIONS IN THE ACQUITTAL OF THE PERPETRATOR OF CORRUPTION PADANG SICINCIN TOLL: Study of Judgment No. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg and Judgment No. 2229 K/Pid.Sus/2023

(Zillan Zolilah Santayana, 2210112016, Faculty of Law, Andalas University, 113 Pages, 2026)

ABSTRACT

Corruption is an endless series of extraordinary crimes in Indonesia; one such case is the corruption scandal in West Sumatra involving the Trans-Sumatra Toll Road project on the Padang-Sicincin Toll Road. Of the 13 (thirteen) defendants, 3 (three) were civil servants at the National Land Agency (BPN) who played a role in issuing and announcing the nominative list—which served as the gateway for the disbursement of compensation to the public—resulting in state losses of approximately Rp 27 billion. At the first-instance level, the defendants were acquitted, but the verdict was overturned to a conviction after the public prosecutor's appeal was granted. Based on this, the author intends to address two issues, namely: 1) What was the standard of proof applied in the Padang Sicincin Toll Road corruption case in Judgment No. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg and Judgment No. 2229 K/Pid.Sus/2023? 2) What were the judges' grounds for acquitting the perpetrators of the Padang Sicincin Toll Road corruption case in Judgment No. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg and Judgment No. 2229 K/Pid.Sus/2023? The research method used is the normative method. The data used in this study consists of secondary data containing primary, secondary, and tertiary legal sources. This study employs a statutory approach and a case-based approach, utilizing data collection techniques such as literature review, document analysis, and interviews. The interviews were conducted with law enforcement officials, namely Ad Hoc Judges for Corruption Crimes at the Padang District Court; prosecutors at the Pariaman District Prosecutor's Office, the Padang District Prosecutor's Office, and the West Sumatra High Prosecutor's Office; advocate at the Legality Law Firm; academics specializing in criminal law and agrarian law at Andalas University; and technical officials, namely employees of the National Land Agency (BPN) at the West Sumatra Regional Office. The research findings are as follows: 1) The presentation of evidence was conducted in two rulings: an acquittal at the first instance, rendered pursuant to Article 184 (1) of Law No. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code regarding the evaluation of evidence; and a conviction at the cassation level, rendered pursuant to Article 253 (1) of No. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code, which provides that the Supreme Court may review a case at the cassation level on three grounds; 2) The judge's basis for rendering an acquittal and a conviction was based on both legal and non-legal considerations. Legal considerations consist of an assessment of the facts established during the trial and an evaluation of the elements of the indictment, while non-legal considerations pertain to the aggravating and mitigating factors regarding the defendants.. Based on this study, recommendations are provided to law enforcement officials, the government, employees of the National Land Agency, and the public regarding both the presentation of evidence in court and the consideration of court rulings that can serve as preventive measures against corruption.

Keywords: Judge's Considerations, Acquittal, Corruption Crime, Padang-Sicincin Toll Road

This minor thesis has defended in front of the examiner team at August 24th, 2026.

Examiner,

Signature	Examiner I	Examiner II
Name	**Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL**	**Riki Afrizal, S.H., M.H.**

Acquainted,
Head of the Department of State Criminal Law: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**

Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty:	Name:	Signature:
No. Alumni University:	Name:	Signature: